

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RIAU
KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH DURI**

LAPORAN AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan menyelesaikan
Studi Pada Program D III Perbankan Syari'ah
Guna memperoleh Gelar A.Md



OLEH :

YUNI EFRI YENTI
NIM: 01026203688

PROGRAM STUDI D III

**PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

1434 / 2013

ABSTRAK

Laporan Akhir ini berjudul : **Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.**

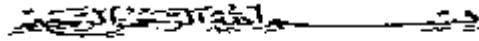
Laporan ini adalah penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 150 A Duri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.

Metodologi penelitian ini adalah metode Observasi, wawancara dengan pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, angket dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pimpinan, para karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri dan nasabah. Objeknya adalah pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri. Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, seluruh karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri yang berjumlah 16 orang dan nasabah pembiayaan yang berjumlah 1659 orang. Peneliti mengambil sampel 5 orang (31,25 %) karyawan yang terdiri dari 4 orang karyawan yang bertugas dibagian pembiayaan dan 1 orang pimpinan dengan teknik purposive sampling serta nasabah pembiayaan 20 orang (1,2 %) dengan teknik random sampling.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri adalah Dengan adanya benar-benar pengawasan terhadap pembiayaan sebelum pemberian pembiayaan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara teliti, melakukan OTS dan wawancara untuk mengecek kebenaran data-data nasabah dan usaha debitur. Kemudian dilakukan penilaian 5C yaitu *charater* (karakter), *capacity* (kapasitas/kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi) dan *collateral* (jaminan). Pengawasan setelah pencairan yaitu memantau mutasi rekening koran nasabah, komunikasi dengan menghubungi nasabah, mengunjungi nasabah, melihat *cashflow* keuangan nasabah dan pengawasan administrasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pembiayaan sebagai berikut : faktor lingkungan, faktor waktu, faktor cuaca, keterbatasan karyawan, nasabah tidak bisa dihubungi, usaha nasabah bangkrut, nasabah tidak ada ditempat, dan kebijakan pemerintah.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjunganalam Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH DURI”** merupakan suatu penelitian yang berbentuk lapangan.

Tugas Akhir ini dapat terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang Tua penulis Ibunda tercinta Murni dan ayah tercinta Edi, serta kakak-kakak dan abang penulis Sukrianto, Syahrul Rahmadhoni, Amin, Resi Susanti, Defi Indra, Sisfayanti, Dina, Erni serta adik-adik penulis Sari Gustina, Topit Ariantoso yang sangat besar sumbangsihnya dalam memotivasi dan mendoakan keberhasilan penulisan serta dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu dekan.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Prodi D3 Perbankan Syari'ah

5. Bapak Khairul Amri, MA selaku Sekjur Jurusan Prodi D3 Perbankan Syari'ah.
6. Bapak H. DR. Zulkayandri, M.Ag selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak H. Maghfirah, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu sampai terselesainya laporan akhir ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat Khususnya di Jurusan D3 PerbankanSyari'ah yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
9. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Duri beserta karyawan dan karyawan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Duri yang telah membantu memberikan informasi dan data untuk menyempurnakan Laporan Akhir ini.
10. Kak Rini, Kak Rika, Abang Rahman, Abang Wawan, Abang Emil karyawan dan Karyawan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Duri yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan akhir ini.
11. Sdri. Kartini dan Sdra. Suhardi yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini sampai dengan selesainya.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penting dalam penyelesaian dan penyempurnaan penelitian ini. Akhirnya, besar kiranya harapan penulis semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Juni 2013

YUNI EFRI YENTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABELv

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang1

B. Batasan Masalah.....9

C. Rumusan Masalah9

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian9

E. Metode Penelitian10

F. Sistematika Penelitian.....13

BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN.....15

A. Sejarah Singkat PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Duri15

B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Duri19

C. Produk PT. Bank Riau Kepri Syari'ah.....19

D. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Duri22

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN PEMBIAYAAN ...24

A. Pengawasan.....24

B. Pembiayaan.....32

**BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RIAU
KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH DURI.....36**

- A. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu
Syari'ah Duri.....36
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pembiayaan yang dilaksanakan
pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri54

BAB V PENUTUP.....57

- A. Kesimpulan57
- B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Perkembangan pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri tahun 2010-2012.....	37
Tabel IV.2	Perkembangan Pembiayaan Menurut Kolektibilitas	47
Tabel IV.3	Apakah ada pengawasan pembiayaan (pemeriksa kelengkapan dokumen-dokumen atau persyaratan sesuai peraturan) yang dilaksanakan oleh PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri	49
Tabel IV.4	Bagaimana ketepatan pengawasan pembiayaan terhadap jadwal yang telah di tentukan mengenai OTS atau survey ke tempat nasabah	50
Tabel IV.5	Apakah ada pengawasan dan kontrol yang di lakukan oleh manajemen pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri setelah pembiayaan di salurkan/dicairkan	51
Tabel IV.6	Bagaimana menurut anda proses pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan manajemen pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur seluruh aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Ekonomi sebagai salah satu aspek dalam kehidupan juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa di pahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak di lengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi¹.

Syari'at Islam adalah sebuah sistem yang mencakup seluruh permasalahan kehidupan. Syari'at Islam menunjukkan jalan iman bagi manusia, menjelaskan pokok-pokok akidah, mengatur hubungannya dengan Tuhan, memerintahkannya membersihkan jiwa dan mengatur hubungannya dengan orang lain². Dan juga suatu sistem yang di gunakan sebagai paduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana³. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan

¹ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), edisi ke-2, h. 1.

² Muhammad Hidayat, *An Introduction to The Shariah Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), Cet. Pertama, h. 45.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. ke-9, h. 11.

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya⁴.

Seiring dengan adanya kegiatan ekonomi, perbankan mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi tersebut. Dengan peningkatan peranan bank dalam kegiatan perekonomian dan keinginan manusia untuk memanfaatkan bank sebagai sarana perantara keuangan, dalam hal ini akan mendorong bank untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat termasuk juga dalam mengeluarkan produk-produk keunggulannya antara lain kredit yang sebagai sarana peningkatan kehidupan masyarakat dan kemajuan suatu bank.

Dalam memacu perkembangan perekonomian Indonesia, fungsi dan peranan perbankan dewasa ini semakin meningkat karena jasa perbankan ini menopang hampir seluruh program dan kegiatan pembangunan ekonomi, industri, perdagangan dan dunia usaha maupun jasa-jasa lainnya. Dalam usaha inilah bank disebut sebagai alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui jenis usaha pembangunan.

Sejak dikeluarkan kebijaksanaan deregulasi perbankan yang cukup mendasar dibidang moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1998, dunia perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut sehubungan dengan masuknya pengusaha besar di Indonesia kedalam bisnis perbankan sehingga jumlah bank swasta meningkat. Perkembangan dunia perbankan yang begitu pesat menimbulkan persaingan yang sangat tajam diantara

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-3 , h. 8.

lembaga keuangan perbankan. Persaingan tersebut dapat dilihat dari salah satu kegiatannya dalam memberikan kredit pada masyarakat.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁵. Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi)⁶. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara

⁵ Kasmir, *op.cit.*, h. 73.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 260.

luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pedanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit⁷.

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan unsur yang sangat penting didalam neraca bank dan sering menunjukkan suatu bagian bahagian besar harta (investasi) bank yang bersangkutan. Untuk itu harus ada pengawasan yang memadai terhadap kredit, agar laporan keuangan yang disajikan menjadi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebelum memberikan pembiayaan, ada suatu proses yang memerlukan pertimbangan dan analisis yang baik. Seorang pimpinan atau pejabat yang berwenang dalam memutuskan pembiayaan harus memperhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan pembiayaan.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-3, h. 160.

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan paling utama dari direksi (*top manajemen*). Melalui pengawasan, para manajer dapat menentukan tercapai tidaknya harapan mereka. Di samping itu, pengawasan ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik⁸.

Agar mudah memilih mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, maka *monitoring* diklasifikasi dalam tiga jenis, jenis Monitoring dan Proses Pengawasan Pembiayaan yaitu sebagai berikut⁹ :

1. *On desk monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di monitor adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.
2. *On site monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.
3. *Exception monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya.

⁸ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 130

⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Managent : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, nasabah praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), Cet. 1, h. 491-492

Pengawasan kredit yang dilakukan bank dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif yaitu¹⁰ :

1. Pengawasan aktif adalah teknik pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah atau debitur lainnya karena pengawasan yang dilakukan secara langsung sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan.
2. Pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung kelapangan, hanya berupa aktifitas-aktifitas seperti : Dengan meningkatkan analisa pembiayaan selain itu juga pengawasan pasif juga dilakukan dikantor yaitu melalui pemeliharaan rekening dan pemeliharaan administrasi pembiayaan.

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam suatu bank terutama terhadap pembiayaan karena dengan pengawasan yang baik diharapkan kesalahan dalam menganalisa bisa dikurangi sehingga peluang untuk terjadinya kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah juga akan berkurang.

Pengawasan yang baik yaitu Bank menerapkan sistem pengawasan pemberian pembiayaan yang diawali dengan prosedur permohonan pembiayaan, pengawasan lanjutan setelah pembiayaan diterima, sampai dengan prosedur pelunasan pembiayaan oleh debitur.

Standar pengawasan bank, setiap bank mungkin mempunyai sistem pengawasannya sendiri yang unik, dan banyak bank mungkin membutuhkan

¹⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), Cet. Ke-4, h. 269

pengawasan yang lebih baik, tetapi walaupun sistem pengawasan itu berbeda-beda, namun dapat diidentifikasi unsur-unsur pengawasan yang lazim terdapat pada semua sistem yang baik yaitu :

1. Standar hendaknya merupakan prestasi yang dikehendaki, itu dapat bersifat keuangan atau tidak dapat di ukur pada umumnya.
2. Prestasi yang sesungguhnya hendaknya dapat di bandingkan dengan standar.
3. Perbedaan-perbedaan antara prestasi standar dengan prestasi yang sesungguhnya hendaknya merupakan isyarat bagi tindakan pembetulan pada waktunya.
4. Standar itu sendiri hendaknya di periksa secara berskala untuk memungkinkan perbaikan¹¹.

Tujuan dari dilakukannya pemantauan dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah adalah¹² :

1. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

¹¹ *Ibid*, h. 130-131

¹² Muhammad, *op.cit.*, h. 266

4. Kebijakan manajemen bank syariah akan lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Duri, merupakan bank pembangunan daerah Riau yang berada di daerah Duri yang bergerak dalam jasa perbankan. Dalam kegiatannya yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dengan tidak menggunakan sistem bunga. Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usahanya, karena pentingnya peranan pembiayaan. Perusahaan memberikan perhatian yang besar dan bersungguh-sungguh dalam pengelolaan pembiayaan.

Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat Bank Syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pembiayaan merupakan asset penting dalam perbankan, oleh karena itu pembiayaan harus di kelola sesuai standar pengawasan yang berlaku. Untuk mengelola pembiayaan dengan baik di perlukan adanya pengawasan terhadap pembiayaan tersebut. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka setiap bank selalu berusaha untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan dan pelayanan kepada nasabah agar tercapai tujuan yang diharapkan melihat betapa pentingnya pengawasan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan dan terbatasnya dana dan waktu maka penulis membatasi masalah yang dibahas yaitu “pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri .

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.

Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Menambah wawasan bagi penulis dalam bidang penelitian sebagai penerapan ilmu dalam bidang perbankan syariah khususnya “pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri”
3. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, dengan alamat jalan jendral sudirman No. 150 A Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Pimpinan, para karyawan PT. Bank Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri dan nasabah pembiayaan. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.

3. Populasi dan sampel

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan itu sendiri yaitu : PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, dengan populasi adalah pimpinan, seluruh karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri yang berjumlah 16 orang dan nasabah pembiayaan yang berjumlah 1659 orang. Dikarenakan populasinya banyak, mengingat terbatasnya dana dan waktu maka peneliti mengambil sampel 5 orang (31,25 %) karyawan yang terdiri dari 4 orang karyawan yang bertugas dibagian pembiayaan dan 1 orang pimpinan dengan teknik purposive sampling serta nasabah pembiayaan 20 orang (1,2 %) dengan teknik random sampling.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan ataupun dengan para karyawan perusahaan berupa tanggapan respon terhadap pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri dan lain-lain data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan secara langsung kelapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan
2. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara langsung dengan bagian pembiayaan, bagian akuntansi dan karyawan yang berhubungan dengan masalah.
3. Angket, yaitu metode dengan menyebarkan kepada nasabah yang berupa pertanyaan guna mengumpulkan data penelitian.
4. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dari PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklasifikasikan data serta menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

7. Teknik penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Gambaran Umum PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, produk-produk yang ditawarkan, dan struktur organisasi.
- BAB III Merupakan tinjauan teori tentang pengawasan pembiayaan perbankan yaitu :
 - a. Pengertian pengawasan, unsur-unsur pengawasan, prinsip-prinsip pengawasan, jenis-jenis pengawasan, jenis-jenis monitoring atau pengawasan pembiayaan, tahapan dalam Proses Pengawasan dan tujuan pengawasan
 - b. Pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan dan fungsi pembiayaan.

BAB IV Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK RIAU KEPRI SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri

Dalam era kompetisi seperti saat ini, berhenti berinovasi berarti mati, inovasi menjadi tuntutan bagi industri untuk terus berkembang dan mandiri. Itulah yang dilakukan Bank Riau Kepri. Di tengah persaingan yang ketat dan tuntutan untuk menjadi lembaga mediasi yang optimal, bank ini terus melakukan perubahan dalam berbagai hal mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengembangan produk, pembenahan organisasi hingga aplikasi teknologi informasi.

Prestasi yang dicapai oleh Bank Riau Kepri saat ini, tidak terlepas dari sejarah panjang bank kebanggaan masyarakat Provinsi Riau Kepri ini setelah mengalami penyesuaian dengan berbagai UU, ketentuan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. Baperi (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas No.1 tanggal 2 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9-4-45 tanggal 15-08-1961. Namun dalam perjalanannya, PT. Baperi tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana syarat-syarat yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tersebut.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk.I Riau No. 51/IV/1966 tanggal 01 April 1966 segala kegiatan PT. BAPERI dinyatakan berakhir, seluruh aktiva dan pasiva PT. Baperi dilikuidasi dan kemudian didirikan Bank Pembangunan Daerah Riau yang baru, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun

2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.

Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor:C-09851. HT.01.01.TH.2Q03 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Pada tanggal 24 April 2010, dihadapan notaris Ferry Baki, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/ KEP/GBi/2010 tanggal 23 September 2010.

Pendirian Bank Riau Syariah dimulai dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syariah.

Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik Internal maupun External, marketing research, training, simulasi serta penyusunan Standar Operasional & Prosedur.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk rehabilitasi gedung untuk Kantor Cabang Syariah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dll.

Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah. Pada tanggal 1 & 22 Juli 2004 dilaksanakan Soft & Grand Opening Bank Riau Syariah yang dihadiri Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau drh. Chaidir MM. Beroperasinya Bank Riau Syariah merupakan sebuah prestasi karena Bank Riau Syariah adalah Bank Daerah Syariah pertama di luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 09 Agustus 2009 Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri diresmikan oleh Bupati Bengkalis Syamsurizal dengan alamat kantor Jalan Jenderal Sudirman No. 150 A kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

B. Visi dan Misi Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri mempunyai strategi dalam kegiatan operasionalnya. Adapun visi dan misi bank tersebut yaitu¹³ :

a. Visi

Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan prinsip syariah.

b. Misi

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.

c. Corporate image

"Mitra Syariah Terpercaya"

C. Produk-Produk Bank Riau Kepri Syariah

Produk-produk Bank Riau Kepri Syariah adalah :

1. Tabungan iB. Simpanan Amanah Riau (SINAR)

Tabungan iB SINAR adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dalam arti dana tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiyaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara professional dan memenuhi kaidah

¹³ Dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 2013

syari'ah. Keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nasabah) yang disepakati dimuka.

2. iB Dhuha Tabungan Haji dan Umrah

Membantu anda merencanakan ibadah haji SISKOHAT, haji Plus dan Umrah. Mewujudkan niat suci anda menuju tanah suci. Tabungan iB Dhuha adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus dan umrah.

3. Giro iB Solusi, Mudah Transaksi Bisnis anda

Giro iB Bank Riau adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip wadi'ah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, Dengan giro iB maka nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer, dana dan pembayaran tunai sewaktu-waktu.

4. Deposito iB, investasi yang aman dan barokah

Deposito iB Bank Riau adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank. Produk ini hadir agar simpanan anda di Bank diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dan insyaAllah mendapat bagi hasil atas hasil usaha Bank.

5. Pembiayaan iB Aneka Guna

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan iB Aneka Guna juga dapat diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya.

6. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, Pensiunan, Pekerja Profesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan atau roda 4 (empat)

7. Pembiayaan iB Pengusaha Kecil. Mitra terpercaya penggiat usaha

Disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah.

8. Pembiayaan iB Niaga Prima

Pembiayaan iB Niaga prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.

9. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah. Mitra terpercaya untuk pemilikan rumah idaman

Pembiayaan iB Pemilikan rumah bersedia membantu pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja propesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun /kondominium, ruko, kios, rukan, apartemen, vila dan kavling siap bangun dengan prinsip murabahah.

10. Gadai Emas iB (Rahn). solusi dana cepat sesuai syariah.

Gadai Emas iB (Rahn Emas) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Riau Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.

11. Pembiayaan iB KARYA PRIMA. Mitra Terpercaya dalam pembangunan

Pembiayaan iB karya Prima membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya.

D. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerja sama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi yang akan menunjang kerangka susunan perwujudan pola hubungan antara

fungsi-fungsi atau menunjukkan kedudukan orang-orang yang bekerja sama, tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi perusahaan adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai semua tujuan.

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, struktur organisasi memperlihatkan tingkat-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberi perintah, menjalankan, melaksanakan, serta siapa yang memutuskan kebijaksanaan, dan lain-lain.

Struktur organisasi tergantung besar kecilnya bank, keragaman layanan yang ditawarkan, keahlian personilnya dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Struktur organisasi di dalam bank tanggung jawab dan wewenang para pejabatnya bervariasi satu sama lain. Oleh karena itu, struktur organisasi mencerminkan pandangan manajemen tentang cara yang paling efektif untuk mengoperasikan bank¹⁴.

Untuk mengetahui dengan jelas lagi struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), Ed. 1, Cet. Pertama, h. 29

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN PEMBIAYAAN

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (top manajemen). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan¹⁵.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi dan tujuan suatu organisasi tercapai dengan mulus dan tanpa ada

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), Ed. 1, Cet. Pertama, h. 35

penyimpangan yang berarti¹⁶. Pengawasan merupakan fungsi organik administrasi dan manajemen karena apabila fungsi itu tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan matinya atau hancurnya suatu organisasi.

2. Unsur-unsur Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa unsur-unsur pengawasan diantaranya sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi.
- d. Karyawan yang bermutu sesuai dengan tanggung jawab.

Sedangkan menurut Mulyadi unsur-unsur pengawasan adalah :

- a. Adanya pelaksanaan yang kompeten (ahli dalam bidangnya) dan dapat dipercaya garis hak dan tanggung jawabnya yang jelas.
- b. Pembagian tugas yang jelas
- c. Adanya prosedur yang otorisasi yang tepat

¹⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2004), Cet. Ke-2, h. 11

- d. Tersedianya dokumen serta catatan yang memadai
- e. Adanya pengawasan yang fisik terhadap aktivitas serta catatan perusahaan
- f. Dilaksanakannya penyelidikan secara independen¹⁷.

Standar pengawasan bank, setiap bank mungkin mempunyai sistem pengawasannya sendiri yang unik, dan banyak bank mungkin membutuhkan pengawasan yang lebih baik, tetapi walaupun sistem pengawasan itu berbeda-beda, namun dapat diidentifikasi unsur-unsur pengawasan yang lazim terdapat pada semua sistem yang baik yaitu :

- 1. Standar hendaknya merupakan prestasi yang dikehendaki, itu dapat bersifat keuangan atau tidak dapat di ukur pada umumnya.
- 2. Prestasi yang sesungguhnya hendaknya dapat di bandingkan dengan standar.
- 3. Perbedaan-perbedaan antara prestasi standar dengan prestasi yang sesungguhnya hendaknya merupakan isyarat bagi tindakan pembetulan pada waktunya.
- 4. Standar itu sendiri hendaknya di periksa secara berskala untuk memungkinkan perbaikan¹⁸.

¹⁷ Mulyadi, *Akuntansi Biaya Untuk Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 1989), h. 8

¹⁸ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 130-131

3. Prinsip-prinsip Pengawasan

Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan, suatu sistem harus memenuhi tiga prinsip sistem pengawasan yang meliputi¹⁹ :

- a. Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan
- b. Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan
- c. Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan.

4. Jenis-jenis Pengawasan

Untuk memudahkan dalam memahami pengawasan ini maka dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan Intern

Adalah semua sistem dan cara yang digunakan di dalam perusahaan sehingga tercapai tujuan suatu organisasi.

- b. Pengawasan Ekstern

Adalah penggunaan sistem pengawasan di mana mekanisme pengawasan itu berjalan dengan efektif karena pengaruh unsur ekstern suatu lembaga perusahaan.

¹⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Managent : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, nasabah praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), Cet. 1, h. 205

c. Pengawasan diri

Adalah kemampuan seseorang menguasai dirinya untuk tidak berbuat curang dan melanggar peraturan²⁰.

Pengawasan disini diperlukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi ganda yaitu himpunan dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian himpunan dana disini adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana itu digunakan kembali atau di jual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan atau *lending*.

Pengawasan kredit yang dilakukan bank dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif yaitu²¹ :

- 1) Pengawasan aktif adalah teknik pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah atau debitur lainnya karena pengawasan yang dilakukan secara langsung sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan.
- 2) Pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung

²⁰ Sofyan Syarif Harahap, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1, Ed ke-1, h. 290-294

²¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), Cet. Ke-4, h. 269

kelapangan, hanya berupa aktifitas-aktifitas seperti : Dengan meningkatkan analisa pembiayaan selain itu juga pengawasan pasif juga dilakukan dikantor yaitu melalui pemeliharaan rekening dan pemeliharaan administrasi pembiayaan.

5. Jenis-jenis Monitoring atau Pengawasan Pembiayaan

Agar mudah memilih mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, maka *monitoring* diklasifikasi dalam tiga jenis, jenis Monitoring dan Proses Pengawasan Pembiayaan yaitu sebagai berikut²² :

- 1) *On desk monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di monitor adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.
- 2) *On site monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.
- 3) *Exception monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya.

²² Veithzal Rivai, dkk, *op cit*, h. 491-492

6. Tahapan dalam Proses Pengawasan

Tahapan-tahapannya adalah 1) Penetapan standar pelaksana (perencana), 2) Penentuan pelaksanaan kegiatan, 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) Perbandingan dengan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan , dan 5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tahapan-tahapan ini akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Penetapan standar

Yaitu suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Yaitu pengukuran ini sebaiknya muadah dilakukan dan tidak mahal serta dapat diterangkan kepada para karyawan

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Yaitu pengukuran yang dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Yaitu bila hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi ini

dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin berubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersama²³.

7. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari dilakukannya pemantauan dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah adalah :

- a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- d. Kebijakan manajemen bank syariah akan lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi²⁴.

²³ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE Anggota IKAPI, 2003), Edisi ke-2, h. 362

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP, 2001), h. 163

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia²⁵.

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holdel, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang di tanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang di kelolanya.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), Ed. 1, Cet. Pertama, h. 196

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya²⁶.

²⁶ *Ibid*, h. 197

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut²⁷ :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. Ke-3, h. 160-161

- b. Pembiayaan investasi, yaitu memenuhi barang –barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

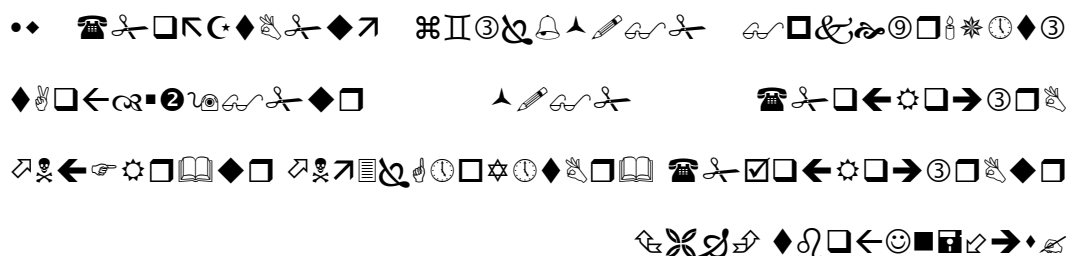
4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank, cabang atau cabang pembantu²⁸. Salah satu fungsinya untuk mengamankan pembiayaan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan pengkhianatan. Sebagaimana dalam firman Allah :

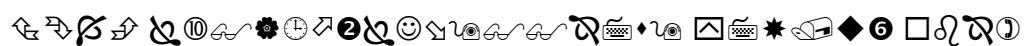


²⁸ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Managent : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, nasabah praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), Cet. 1, h. 485

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui."* (QS. Al-Anfal: 27)



Artinya : *"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya."* (QS. Al-Mu'minuun: 8)



Artinya : *"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi."* (QS. Al-Fajr : 14)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pembelian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang defisit unit²⁹ dan juga pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana.

Pembiayaan yang di katakan sukses dalam perbankan yaitu apabila ada penyaluran dana dan ada juga pengembalian dana tersebut, maksudnya adalah bank memberikan pembiayaan (pinjaman) kepada debitur dan debitur harus mengembalikan pembiayaan yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan keuntungan yang telah disepakati³⁰.

Jenis pembiayaan yang ada pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri yaitu³¹:

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. Ke-3, h. 160

³⁰ Enda Dwi Seputra, SE.,QIA, (Pimpinan) Wawancara, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

³¹ Muhamad Syakir Kamil, (Account Officer Pembiayaan) Wawancara, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi untuk meningkatkan usaha, dalam pembiayaan ini nilainya lebih ke usaha. Contoh: pembiayaan modal kerja untuk membeli barang-barang dagang sedangkan investasi yaitu membeli ruko untuk tempat usaha.

Persyaratan umum :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 2. Fotocopy KTP suami dan istri, kartu keluarga (KK), surat nikah
 3. Fotocopy rekening listrik/PAM/telepon
 4. Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (suami dan istri)
 5. Surat izin usaha yang masih berlaku, terdiri dari :
 - i. Surat izin tempat usaha (SITU)
 - ii. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - iii. Tanda daftar perusahaan (TDP)
 - iv. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - v. SIUJK dan izin-izin terkait dengan usaha bersangkutan
 6. Rencana penggunaan dana
 7. Fotocopy sertifikat tanah
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta yang berpenghasilan tetap. Objek yang dapat dibiayai adalah perabot/peralatan rumah tangga, laptop, komputer, handphone dan kebutuhan lainnya sesuai prinsip syariah.

Persyaratan umum :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melampirkan :
pas photo suami dan istri ukuran 3 x 4, fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku, fotocopy kartu keluarga dan surat nikah, fotocopy SK. Calon pegawai, fotocopy SK. Pertama (PN bagi PNS) dan SK. Pangkat terakhir, fotocopy karpeg dan taspen, fotocopy kartu tanda anggota (KTA), surat keterangan dari perusahaan, fotocopy surat angunan tambahan sesuai ketentuan Bank Riau, daftar perincian gaji terakhir.

Tabel IV.1

Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu

Syariah Duri

Tahun 2010-2012

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2010	2011	2012
Pembiayaan produktif	10.924.544.209,77	14.312.984.372,56	29.241.350.899,07
pembiayaan konsumtif	9.580.284.170,39	20.923.581.964	30.741.217.688,13
Jumlah	20.504.828.380,16	35.236.566.336,56	59.982.568.587,20

Sumber : PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri

Dari data di atas dapat dilihat bahwa secara umum pembiayaan yang disalurkan meningkat dari tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 jumlah pembiayaan yang telah disalurkan sejumlah Rp. 20.504.828.380,16 yang terdiri dari pembiayaan produktif Rp. 10.924.544.209,77 dan pembiayaan konsumtif Rp. 9.580.284.170,39, pada tahun 2011 jumlah pembiayaan yang telah disalurkan sejumlah Rp. 35.236.566.336,56 yang terdiri dari pembiayaan produktif Rp. 14.312.984.372,56 dan pembiayaan konsumtif Rp. 20.923.581.964 sedangkan

pada tahun 2012 jumlah pembiayaan yang telah disalurkan sejumlah Rp. 59.982.568.587,2 yang terdiri dari pembiayaan produktif Rp. 29.241.350.899,07 dan pembiayaan konsumtif Rp. 30.741.217.688,13.

Di samping itu, dalam pemberian pembiayaan melewati beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah³² :

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Pengajuan permohonan adalah permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang di ajukan oleh calon debitur kepada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri di lengkapi dengan dokumen-dokumen.

2. *On the spot* (OTS) dan wawancara

Setelah menerima pengajuan permohonan pembiayaan calon debitur berserta lampiran-lampirannya (dokumen-dokumen) yang telah lengkap. *Account Officer*, pinsi pembiayaan dan bahkan pimpinan melakukan *on the spot* ke lokasi usaha dan lokasi jaminan nasabah pembiayaan. Kemudian melakukan wawancara mengenai usaha calon debitur tersebut. Hasilnya di tuangkan dalam laporan kunjungan ke lokasi usaha dengan tujuan untuk :

- a. Mengecek kebenaran data-data keuangan nasabah dan usaha yang disampaikan calon debitur.
- b. Mengecek jaminan/agunan yang akan di serahkan, meliputi status kepemilikannya, banyaknya, taksiran nilainya, proyeksi keamanan

³² Fadhly Indrawan, (*Account Officer* Qardh/Rahn) *Wawancara*, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

lokasi (lokasi tanah) terhadap kemungkinan pengembangan tata kota oleh pemerintah daerah.

Hal ini juga di lakukan untuk pembiayaan konsumtif yang plafond pembiayaannya lebih dari Rp. 200.000.000,00 , calon debitur harus mempunyai jaminan tambahan berupa surat tanah atau sertifikat tanah.

3. Analisa pembiayaan

Selanjutnya yang dilakukan *account officer* yaitu melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Adapun metode yang digunakan yaitu metode analisa 5C yaitu :

- a. Character (karakter) yaitu karakter atau watak pemohon, merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank.
- b. Capacity (kapasitas/kemampuan), yakni penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban kepada bank.
- c. Capital (modal), yakni penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian aspek keuangan pemohon.
- d. Condition (kondisi), yakni penilaian terhadap kondisi umum yang memengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi usaha, persaingan dagang, peraturan pemerintah dan lain-lain.

e. Collateral (jaminan), yakni analisa yang diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Analisa dilakukan antara lain :

1. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
2. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan
3. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
4. Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi
5. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi pula kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
6. Marketabilitas jaminan, jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketabel* suatu jaminan.

4. Persetujuan pinsi pembiayaan dan pimpinan.

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha atau pembiayaan konsumtif, proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank. Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, persetujuan pinsi pembiayaan dan pimpinan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Dengan demikian hasil akhirnya adalah penolakan, penundaan ataupun persetujuan pembiayaan. Jika hasil akhirnya persetujuan, biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Jika hasil akhirnya penolakan

maka proposal pembiayaan akan dikembalikan lagi kepada nasabah pembiayaan³³, selanjutnya *account officer* harus membuat surat penolakan pembiayaan.

5. Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi pinsi pembiayaan dan pimpinan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

6. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan.

Dalam pengikatan ini, nasabah bersangkutan (suami istri) menandatangani akad perjanjian dan nasabah tidak boleh diwakili oleh orang lain³⁴.

Secara garis besar, pengikatan terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Pengikatan di bawah tangan, yakni proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah.
- b. Pengikatan notaril, yakni proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

Terkait dengan jaminan, maka jenis pengikatan terdiri dari³⁵ :

- a. Hak tanggungan, untuk jaminan berupa tanah.

³³ Abdul Mubarak, (Pinsi Pembiayaan) *Wawancara*, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

³⁴ Abdul Rahman, (Adm Pembiayaan) *Wawancara*, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

³⁵ Hamdani, (*Account Officer* Pembiayaan) *Wawancara*, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

- b. FEO (*Fiducia Eigendoms Overdracht*) atau fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak.
- c. Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga dan logam mulia yang penguasaannya ada ditangan bank. Pengikatan gadai ini biasanya disertai dengan surat kuasa mencairkan.

7. Pencairan

Adalah dimana setelah persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada bank. Pencairan pembiayaan merupakan titik awal efektifnya pembiayaan, sejak saat pencairan inilah pembiayaan mulai mengandung resiko bagi bank maka sejak itu perlunya pengawasan yang lebih.

8. Pengawasan atau monitoring dan pemantauan

Proses selanjutnya adalah proses pengawasan atau monitoring terhadap debitur. Pengawasan ini dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target yang di buat oleh debitur sebelumnya. *Account officer* meninjau langsung kelapangan untuk melihat perkembangan usaha debitur.

Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri ada beberapa tahap yaitu³⁶:

1. Pengawasan sebelum pemberian pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan faktor yang sangat penting diperhatikan adalah memeriksa atau mengecek dan meneliti kelengkapan

³⁶ Muhamad Syakir Kamil, (*Account Officer* Pembiayaan) Wawancara, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

dokumen/berkas-berkas permohonan pembiayaan, terutama yang menyangkut aspek yuridis, keuangan dan jaminan.

Data-data tersebut harus di selidiki kebenarannya dengan cara mencari informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Bank dapat meminta informasi dari Bank Indonesia dan bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga-tetangga calon debitur bahkan dari ketua RT, RW, kepala desa atau Camat. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang pembiayaannya (kredit), dapat dilihat dari penampilan atau kinerja kreditnya pada masa yang lalu, apakah pengembaliannya cukup lancar atau pernah mengalami kemacetan.

Account officer dan manajer pembiayaan melakukan *on the spot* ke lokasi usaha dan jaminan calon debitur untuk mengecek kebenaran data-data tersebut. Kemudian mengecek agunan yang di serahkan, meliputi status kepemilikannya, banyaknya, taksiran nilainya dan lain-lain. Bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki calon debitur.

Data-data tersebut penting bagi perusahaan untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah sehingga menumbuhkan keyakinan Bank dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan pemberian pembiayaan yang berlaku, dimana keyakinan tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian 5C yaitu :

1. *Character* (karakter), yakni karakter atau watak
2. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), yakni penilaian mengenai kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan.

3. *Capital* (modal), yakni penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan.
4. *Condition* (kondisi), yakni penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha.
5. *Collateral* (jaminan), yakni analisa yang di arahkan terhadap jaminan yang diberikan.

Pengawasan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri khususnya dalam pengawasan pembiayaan sifatnya sistematis yang artinya semua karyawan ikut terlibat dan saling memberi masukan untuk kepentingan bank. Dalam pemberian keputusan suatu pembiayaan tidak begitu saja langsung diberi persetujuan.

Analisis, prinsip pembiayaan dan pimpinan harus merembuk atau saling interaksi agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Oleh sebab itu antara karyawan harus menciptakan kondisi yang nyaman dan baik dalam tim agar menghasilkan suatu yang baik juga³⁷.

2. Pengawasan setelah pemberian pembiayaan

Pengawasan setelah pemberian pembiayaan yaitu pengawasan terhadap penagihan pembiayaan. Kontrol dan pemantauan yang dilaksanakan yaitu :

1. Memantau mutasi rekening koran nasabah
2. Komunikasi, yaitu Pihak manajemen pembiayaan akan menagih dengan cara yang terbaik apabila nasabah terlambat

³⁷ Enda Dwi Seputra, SE.,QIA, (Pimpinan) Wawancara, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

dalam membayar angsurannya, dimana pihak manajemen akan mengingatkan agar debitur tidak lupa dengan cara menelpon debitur bahwa pembiayaannya telah jatuh tempo.

3. Mengunjungi debitur

Melakukan pendekatan dan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha debitur. pendekatan-pendekatan inilah cara manajemen pembiayaan mengawasi debitur, untuk kemudian memberikan penyegaran mengenai usaha debitur dan memberikan advis penyelesaian masalah.

4. Melihat *cashflow* keuangan debitur.

3. Melakukan pengawasan administrasi

Pinsi operasional akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan secara administratif, sehingga berkas-berkas yang dilaporkan adalah data yang sesungguhnya dan dapat di percaya dengan kata lain bukan data rekayasa pejabat bagian pembiayaan. Berkas-berkas tersebut diperiksa, jika semua persyaratan lengkap maka setiap lembaran akad pembiayaan di paraf oleh pinsi operasional kemudian di serahkan kepada pimpinan untuk di tanda tangani. Apabila masih ada persyaratan yang belum lengkap maka berkas-berkas di serahkan kembali kepada pelaksana pembiayaan.

Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri untuk semua kategori pembiayaan yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet minimal setiap 6 bulan sekali dilakukan pengawasan dan monitoring dengan turun kelapangan meninjau usaha debitur dan jaminan yang diserahkan debitur. Tetapi hal demikian tergantung kebijakan manajemen pembiayaan, karena pembiayaan yang tidak lancar harus selalu dilakukan monitoring dan pemantauan. Setiap tahunnya dilakukan taksasi ulang jaminan untuk kepentingan bank yaitu meningkatkan asset bank, karena setiap tahun nilai jual tanah dan bangunan bertambah³⁸.

Pengawasan dan monitoring yang lain dilakukan dengan cara setiap pagi Pimpinan melihat neraca dan melihat pembiayaan debitur yang tidak lancar kemudian membuat rencana/program mengenai hal tersebut. Biasanya dilakukan kunjungan ke tempat debitur. Tugas ini biasanya dilakukan oleh petugas dari pembiayaan yang ditunjuk oleh Pimpinan Cabang Pembantu dan Pinsi Pembiayaan dengan membagi-bagi tempat yang dikunjungi. Walaupun sudah dilaksanakan, akan tetapi ada juga yang terlewati atau tidak dikunjungi karena banyaknya nasabah pembiayaan.

Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak lancarnya pengembalian pembiayaan, seperti pada tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan pembiayaan menurut kolektibilitas, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

³⁸ Enda Dwi Seputra, SE.,QIA, (Pimpinan) *Wawancara*, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

Tabel IV.2
Perkembangan Pembiayaan Menurut Kolektibilitas
Tahun 2010-2012

Kolektibilitas Pembiayaan	Tahun		
	2010	2011	2012
Lancar	19.086.605.874	29.985.660.390,11	55.189.358.824,77
Perhatian Khusus	1.224.957.182,27	4.598.886.995,01	2.827.635.383,24
Kurang Lancar	29.939.685,17	652.018.951,44	1.560.148.724,51
Diragukan	163.325.638,72	0	405.425.654,68
Jumlah	20.504.828.380,16	35.236.566.336,56	59.982.568.587,20

Sumber : PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2010 jumlah pembiayaan yang yang disalurkan Rp. 20.504.828.380,16 dengan rincian pembiayaan yang lancar Rp. 19.086.605.874, pembiayaan yang dalam perhatian khusus Rp. 1.224.957.182,27, pembiayaan yang kurang lancar Rp. 29.939.685,17 dan pembiayaan yang diragukan Rp. 163.325.638,72. Pada tahun 2011 jumlah pembiayaan yang yang disalurkan Rp. 35.236.566.336,56 dengan rincian pembiayaan yang lancar Rp. 29.985.660.390,11, pembiayaan yang dalam perhatian khusus Rp. 4.598.886.995,01, pembiayaan yang kurang lancar Rp. 652.018.951,44 dan tidak terdapat pembiayaan yang diragukan. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah pembiayaan yang yang disalurkan Rp. 59.982.568.587,20 dengan rincian pembiayaan yang lancar Rp. 55.189.358.824,77, pembiayaan yang

dalam perhatian khusus Rp. 2.827.635.383,24, pembiayaan yang kurang lancar Rp. 1.560.148.724,51 dan pembiayaan yang diragukan Rp. 405.425.654,68.

Adanya pembiayaan yang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan bahkan macet dapat dijelaskan dimana periode tahun 2010 menunjukkan adanya pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah hingga adanya pembiayaan yang “diragukan” pengembalian angsurannya, sedangkan ditahun 2011 tidak ada pembiayaan yang “diragukan” pengembalian angsurannya. Namun, ditahun 2012 ada lagi pembiayaan yang “diragukan” pengembalian angsurannya.

Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan pemantauan dalam pembiayaan kepada debiturnya. Tidak adanya pembiayaan yang diragukan pengembalian angsurannya pada tahun 2011 dikarenakan efektifnya dan adanya pengawasan dan pemantauan secara merata atau keseluruhan yang dilaksanakan oleh manajemen pembiayaan. Tetapi, ditahun 2012 pengawasan dan pemantauan terhadap debitur ada yang terlewat atau tidak dikunjungi. Hal ini disebabkan kesibukkan bagian pembiayaan dalam menangani masalah pembiayaan sehingga pemantauan terhadap pembiayaan ke lokasi nasabah tidak merata (tidak keseluruhan) dan juga semakin bertambahnya nasabah pembiayaan setiap tahunnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pembiayaan yang bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya ketelitian petugas pembiayaan dalam mereview berkas permohonan nasabah dan tidak

terdapatnya pengawasan terhadap usaha nasabah setelah pencairan dilakukan. Akan tetapi pada data di atas juga dapat disimpulkan bahwa di dalam pembiayaan tidak ada pembiayaan yang macet dari tahun ke tahun. Dengan demikian inilah peran penting dan fungsi dari pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri.

Untuk melengkapi penelitian ini maka penulis membuat anget untuk mengetahui ada atau tidak dilaksanakan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3

Apakah ada pengawasan pembiayaan (memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen atau persyaratan sesuai peraturan) yang di laksanakan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri sebelum pemberian pembiayaan

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Ada terlaksana	20	100 %
2	Kurang terlaksana	0	0 %
3	Tidak ada terlaksana	0	0 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : *Hasil penelitian tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada pengawasan pembiayaan (memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen atau persyaratan sesuai peraturan) yang di laksanakan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri sebelum pemberian pembiayaan adalah ada terlaksana dengan persentase 100% atau 20 orang, kurang terlaksana 0% dan tidak ada terlaksana 0%. Dengan demikian pengawasan pembiayaan (memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen

atau persyaratan sesuai peraturan) ada di laksanakan sebelum pemberian pembiayaan, karena jika semua dokumen tidak lengkap *account officer* tidak akan memproses permohonan pembiayaan tersebut.

Tabel IV.4

Bagaimana ketepatan pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap jadwal yang telah di tentukan mengenai OTS atau survey ke tempat nasabah

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Selalu tepat	15	75 %
2	Kadang-kadang tepat	3	15 %
3	Selalu tidak tepat	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : *Hasil penelitian tahun 2013*

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bagaimana ketepatan pelaksanaan pengawasan pembiayaan terhadap jadwal yang telah di tentukan mengenai OTS atau survey ke tempat nasabah yaitu selalu tepat dengan persentase 75% atau 15 orang, kadang-kadang tepat dengan persentase 15% atau 3 orang dan selalu tidak tepat 10% atau 2 orang. Ini bermakna bahwa pihak pembiayaan selalu tepat waktu melakukan survey ke lokasi nasabah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Tabel IV.5

Apakah ada pengawasan dan kontrol yang di lakukan oleh manajemen pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri setelah pembiayaan disalurkan/dicairkan

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Ada pengawasan dan kontrol	12	60 %
2	Kurang pengawasan dan kontrol	2	10 %
3	Tidak ada pengawasan dan kontrol	6	30 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : *Hasil penelitian tahun 2013*

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat selain melakukan pengawasan pembiayaan survey ke tempat nasabah, juga apakah ada pengawasan dan kontrol setelah pembiayaan disalurkan/dicairkan yaitu ada pengawasan dan kontrol dengan persentase 60% atau 12 orang, kurang pengawasan dan kontrol dengan persentase 10% atau 2 orang dan tidak ada pengawasan dan kontrol dengan persentase 30% atau 6 orang. Dengan demikian pengawasan dan kontrol benar-benar ada dilakukan oleh pihak pembiayaan.

Dalam pembiayaan yang tidak lancar dan bermasalah pengawasan dan kontrol lebih sering dilakukan, akan tetapi dalam pembiayaan yang lancar hanya dilakukan pemantauan mengenai perkembangan usahanya³⁹.

Tabel IV.6

Bagaimana menurut anda proses pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan manajemen pembiayaan pada PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	15	75%
2	Kurang baik	5	25%
3	Tidak baik	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber : *Hasil penelitian tahun 2013*

Dari tabel diatas menunjukkan penilaian debitur terhadap pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pihak manajemen pembiayaan selama proses pembiayaan hingga setelah pembiayaan disalurkan. Bagaimana menurut debitur proses pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan manajemen pembiayaan pada PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri yaitu baik dengan persentase

³⁹ Rinaldi, Pemilik Toko Pakaian “TOP MODE”, wawancara, Duri, 04 Juni 2013

75 % atau 15 orang, kurang baik dengan persentase 25% atau 5 orang dan tidak baik dengan persentase 0%. Dengan demikian pengawasan dan pemantauan dilakukan dengan baik. Hal ini dilakukan juga untuk kepentingan bank dan kepentingan nasabah agar bisa menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang diterimanya dengan baik.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pembiayaan dapat dikatakan juga kendala yang dihadapi manajemen pembiayaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembiayaan, dengan adanya kendala-kendala secara otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembiayaan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh manajemen pembiayaan (pimpinan, pinsi pembiayaan, *account officer* dalam melaksanakan pengawasan pembiayaan yaitu sebagai berikut ⁴⁰:

1. Nasabah tidak dapat dihubungi melalui alat komunikasi seperti telepon, handpone dan lain-lain. Dalam hal ini nomor handpone atau telepon yang pada data identitas nasabah atau yang diberikan oleh nasabah ke pada pihak bank tidak aktif lagi. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan, sehingga nasabah tidak bisa dihubungi.

⁴⁰ Muhamad Syakir Kamil, (*Account Officer* Pembiayaan) Wawancara, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 03 Juni 2013

2. Usaha nasabah sudah tutup atau bangkrut, sehingga nasabah tidak bisa ditemui di tempat usahanya.
3. Nasabah tidak ada dirumahnya.
4. Nasabah sudah mulai bermasalah, maksudnya debitur sudah tidak berniat untuk membayar angsuran.
5. Faktor lingkungan Maksudnya adalah faktor yang ada disekitarnya, contoh: buah sawit yang trek/sedikit. Hal demikian bagi petani sawit yang menerima fasilitas pembiayaan akan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran, karena sumber pembayarannya berasal dari usaha hasil sawit.
6. Kebijakan pemerintah, yakni adanya kebijakan perintah yang melarang usaha debitur untuk dilaksanakan.
7. Faktor waktu, maksudnya yaitu tidak adanya waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan.
8. Keterbatasan karyawan pembiayaan
Masih relatif minimnya sumber daya manusia yang ada khususnya di bidang pembiayaan.
9. Faktor cuaca, yakni hari hujan, panas dan lain-lain.
10. Faktor jarak, yakni nasabah pembiayaan yang ada tidak hanya berada disekitar Kecamatan Mandau saja tetapi juga ada di Kecamatan lain seperti kecamatan pinggir, dan bahkan daerah lain. Jauhnya jarak yang ditempuh akan berpengaruh juga dengan pengawasan yang dilaksanakan karena tidak efektifnya pengawasan yang jaraknya jauh sehingga tidak terlaksana.

11. Kesibukan-kesibukan karyawan pembiayaan

Maksudnya adalah karyawan tersebut sudah ada tugasnya masing-masing, banyak pekerjaan dan kesibukan akan berpengaruh juga terhadap pengawasan pembiayaan.

Dalam hal ini, adanya kendala dalam pengawasan menyebabkan lemahnya pengawasan, sehingga pengawasan tersebut tidak efektif. Dengan demikian, usaha untuk menjadikan pengawasan yang efektif harus dimulai dengan cara memperbaiki semua hambatan dan kendala yang ada.

Adapun jalan keluar dari kendala-kendala yang dihadapi oleh manajemen pembiayaan adalah dengan melalui beberapa tahap proses yaitu : 1) Penentuan standar kerja, 2) Penilaian kerja, 3) Pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan, 4) Membentuk kelompok kerja yang berbeda dan merubah cara kerja yang berbeda.

Kemudian tindakan yang dilakukan pimpinan untuk menghadapi salah satu kendala-kendala tersebut yaitu dengan cara mengerahkan karyawan yang lain dalam ikut serta melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pembiayaan yang tidak lancar seperti supir, satpam, dan bahkan melakukan pengawasan atau kontrol di hari tidak jam kerja⁴¹.

⁴¹ Enda Dwi Seputra, SE.,QIA, (Pimpinan) *Wawancara*, kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, 04 Juni 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri ada beberapa tahap yaitu:
 - a. Pengawasan sebelum pemberian pembiayaan, yakni dalam pemberian pembiayaan faktor yang sangat penting diperhatikan adalah memeriksa atau mengecek dan meneliti kelengkapan dokumen/berkas-berkas permohonan pembiayaan.
 - b. Pengawasan setelah pemberian pembiayaan yaitu pengawasan terhadap penagihan pembiayaan. Kontrol dan pemantauan yang dilaksanakan yaitu : Memantau mutasi rekening koran nasabah, komunikasi, mengunjungi debitur dan melihat *cashflow* keuangan debitur.
 - c. Melakukan pengawasan administrasi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pembiayaan yaitu nasabah tidak dapat dihubungi, usaha nasabah sudah tutup atau bangkrut, nasabah tidak ada dirumahnya, faktor lingkungan, kebijakan pemerintah, faktor

waktu, keterbatasan karyawan pembiayaan dan lain-lain. Adapun tindakan yang dilakukan untuk menghadapi salah satu kendala yaitu dengan cara mengerahkan karyawan yang lain dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang tidak lancar seperti supir, satpam, dan bahkan melakukan pengawasan atau kontrol di luar jam kerja.

B. Saran

1. Dalam mempertahankan predikat bank yang bagus di riau, hendaknya mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pengawasan, khususnya pengawasan pembiayaan.
2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri diharapkan semakin meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat baik mengenai fasilitas yang di butuhkan atau jasa-jasa lainnya. Disamping itu PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Duri diharapkan semakin memperhatikan para pengusaha kecil yang memerlukan modal.
3. Agar pembiayaan yang kurang lancar dan bermasalah dapat ditagih atau terus menurun, maka upaya yang sebaiknya dilakukan adalah :
 - 1) melakukan pengawasan terhadap pembiayaan golongan II, III, IV dan V (perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet)
 - 2) dengan melakukan kerja sama dengan nasabah itu sendiri atau dengan melakukan pendekatan pribadi dengan tujuan agar nasabah secara baik-baik mampu melunasi kewajibannya dengan Bank
 - 3) selektif dalam melakukan pemberian pembiayaan agar tidak menambah pembiayaan yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, Hani, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE Anggota IKAPI, 2003), Edisi ke-2
- Harahap, Sofyan Syafri, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2004), Cet. Ke-2
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. ke-9
- Kasmir, S.E, MM, *pemasaran Bank*, (Jakarta: KENCANA, 2008), Cet. ke-3
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), edisi ke-2
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), Ed. 1, Cet. Pertama
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya Untuk Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 1989)
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank* , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), Cet. Ke-4
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Managent : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, nasabah praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), Cet. 1

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, Hani, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE Anggota IKAPI, 2003), Edisi ke-2

Harahap, Sofyan Syafri, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2004), Cet. Ke-2

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. ke-9

Kasmir, S.E, MM, *pemasaran Bank*, (Jakarta: KENCANA, 2008), Cet. Ke-3

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), edisi ke-2

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), Ed. 1, Cet. Pertama

Mulyadi, *Akuntansi Biaya Untuk Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 1989),

Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank* , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), Cet. Ke-4

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Managent : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga KeuSangan, nasabah praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), Cet. 1